EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN DEMOKRASI DESA DI DESA BARAMBANG KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI

Supriadi Supriadi¹, Jusniaty Jusniaty², Mursak Mursak³, Ashar Abdillah⁴, Adi Nawir⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Sinjai

Email: jusniatye@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan demokrasi desa di Desa Barambang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. BPD memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurang optimalnya fungsi pengawasan, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama mencakup anggota BPD, kepala desa, tokoh masyarakat, warga desa. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator kinerja input, proses, output, dan outcome.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Barambang telah menjalankan fungsi-fungsinya dengan cukup baik. Dalam fungsi legislasi, BPD telah konsisten menetapkan 5 peraturan desa selama periode 2022-2023, mencakup APBDesa, RKPDesa, dan perubahan APBDesa, dengan peningkatan produktivitas dari 2 peraturan (2022) menjadi 3 peraturan (2023). Fungsi penyerapan aspirasi dilaksanakan melalui mekanisme terstruktur dengan sistem dokumentasi dan tindak lanjut yang baik, didukung oleh 16 kali rapat koordinasi selama periode 2022-2024. Fungsi pengawasan dijalankan secara komprehensif mulai dari perencanaan hingga realisasi kegiatan pemerintah desa dengan koordinasi rutin 2 kali per tahun.

Kata Kunci: Kinerja, BPD, Demokrasi Desa, Evaluasi, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Village Consultative Body (BPD) in the implementation of village democracy in Barambang Village, Sinjai Borong District, Sinjai Regency. BPD has a strategic function in the implementation of village government, namely the function of legislation, supervision, and absorption of community aspirations. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as low community participation, suboptimal supervision functions, and weak coordination with village governments.

This study uses a qualitative approach with a participatory method. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and documentation. The main informants include BPD members, village heads, community leaders, villagers. Evaluation is carried out based on input performance indicators, processes, outputs, and outcomes.

The results of the study show that the Barambang Village BPD has carried out its functions quite well. In the legislative function, the BPD has consistently established 5 village regulations during the 2022-2023 period, including the Regional Budget, the Regional Budget, and the amendment of the Regional Budget, with an increase in productivity from 2 regulations (2022) to 3 regulations (2023). The aspiration absorption function is carried out through a structured mechanism with a good documentation and follow-up system, supported by 16 coordination meetings during the 2022-2024 period. The supervision function is carried out comprehensively, starting from planning to the realization of village government activities with routine coordination 2 times per year.

Keywords: Performance, BPD, Village Democracy , Evaluation, Community Participation

PENDAHULUAN

Demokrasi di tingkat desa merupakan fondasi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Indonesia, 2024). Dalam konteks ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa memiliki fungsi utama dalam penyelenggaraan demokrasi desa, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penyerapan aspirasi (Sutoro, 2020). Keberadaan BPD diharapkan dapat menjamin terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan desa terhadap kebutuhan masyarakat (Syahrul, 2021).

Namun dalam implementasinya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2018) menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek kapasitas anggota BPD, koordinasi dengan pemerintah desa, serta mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Sementara itu, Prasetyo (2019) mengidentifikasi bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan program pembangunan.

Permasalahan lain yang sering muncul adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan BPD, baik dalam musyawarah desa maupun dalam proses penyampaian aspirasi (Mulyadi, 2020). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi BPD, keterbatasan akses informasi, serta belum optimalnya mekanisme komunikasi antara BPD dengan masyarakat (Nugroho, 2021).

Desa Barambang di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai merupakan salah satu desa yang telah menjalankan sistem pemerintahan desa dengan melibatkan BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat. Sebagai desa yang berada di wilayah Sulawesi Selatan dengan karakteristik masyarakat yang heterogen dan dinamika sosial-ekonomi yang berkembang, evaluasi terhadap kinerja BPD dalam penyelenggaraan demokrasi desa menjadi penting untuk dilakukan (Rahman, 2022).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait kinerja BPD di Desa Barambang. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang masih bervariasi. Kedua, mekanisme penyerapan aspirasi yang belum terstruktur dengan baik. Ketiga, koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal perencanaan dan pengawasan pembangunan desa (Sari, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja BPD dalam penyelenggaraan demokrasi desa di Desa Barambang, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas demokrasi di tingkat desa dan dapat menjadi referensi bagi desa-desa lain yang memiliki karakteristik serupa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *(1)* Bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai? *(b)* Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan demokrasi desa di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai?

Pendekatan pemecahan masalah untuk menjawab permasalahan tersebut, maka indikator kinerja yang relevan dengan menggunakan pendekatan komprehensif yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kinerja BPD dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan demokrasi desa di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Demokrasi Desa

Demokrasi desa merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks pemerintahan di tingkat desa yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Sutoro (2019), demokrasi desa bukan hanya sekedar mekanisme pemilihan kepala desa, tetapi lebih luas mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan desa.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi desa memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan demokrasi di tingkat nasional atau daerah. Widjaja (2020) menjelaskan bahwa demokrasi desa memiliki ciri-ciri yang unik, yaitu lebih mengedepankan musyawarah mufakat sebagai mekanisme pengambilan keputusan, mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan adat istiadat, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat tanpa memandang status sosial ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi desa meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan demokrasi desa juga tidak dapat dipisahkan dari konsep otonomi desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Rahman (2021) menegaskan bahwa otonomi desa memberikan ruang bagi berkembangnya demokrasi desa yang lebih substantif, dimana masyarakat memiliki kewenangan nyata dalam menentukan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di desanya.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Kedudukan dan Peran BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Arifin (2020) menjelaskan bahwa BPD memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem pemerintahan desa karena berfungsi sebagai lembaga legislatif yang menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa bersifat sejajar dengan pemerintah desa, namun memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Prasetyo (2019) menekankan bahwa hubungan antara BPD dan pemerintah desa bukanlah hubungan hierarkis, melainkan hubungan kerja sama yang bersifat checks and balances untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

2. Fungsi dan Tugas BPD

BPD memiliki tiga fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi penyerapan aspirasi. Hadi (2021) menjelaskan bahwa ketiga fungsi ini merupakan pilar utama dalam menjamin terselenggaranya demokrasi desa yang berkualitas.

a. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi BPD meliputi pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama kepala desa, pembahasan dan persetujuan APBDes, serta pembahasan dan penetapan rencana pembangunan jangka menengah desa. Setiawan (2020) menegaskan bahwa fungsi legislasi BPD sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program desa telah melalui proses demokratis dan mendapat legitimasi dari wakil masyarakat.

b. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan BPD mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa. Mulyadi (2021) menjelaskan bahwa fungsi pengawasan BPD merupakan mekanisme kontrol sosial yang penting untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Fungsi Penyerapan Aspirasi

Fungsi penyerapan aspirasi meliputi penampungan aspirasi masyarakat, penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa, dan tindak lanjut aspirasi masyarakat. Kusuma (2019) menekankan bahwa fungsi ini merupakan

jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif.

3. Evaluasi Kinerja Lembaga Pemerintahan

a. Konsep Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian sistematis terhadap pencapaian suatu organisasi atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam konteks lembaga pemerintahan, evaluasi kinerja memiliki peran penting dalam menjamin akuntabilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Susanto (2020) menjelaskan bahwa evaluasi kinerja lembaga pemerintahan harus dilakukan secara objektif, transparan, dan partisipatif untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Indikator Kinerja BPD

Pengukuran kinerja BPD dapat dilakukan melalui berbagai indikator yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Jaya (2021) mengidentifikasi beberapa indikator kinerja BPD, yaitu:

- 1) Indikator Input: meliputi kualitas sumber daya manusia anggota BPD, ketersediaan sarana dan prasarana, dan dukungan anggaran untuk operasional BPD.
- 2) Indikator Proses: meliputi frekuensi dan kualitas rapat BPD, mekanisme penyerapan aspirasi, dan koordinasi dengan pemerintah desa.
- 3) Indikator Output: meliputi jumlah peraturan desa yang dihasilkan, jumlah program pengawasan yang dilakukan, dan jumlah aspirasi masyarakat yang ditampung.
- 4) Indikator Outcome: meliputi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPD, tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan BPD, dan tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja BPD

Kinerja BPD dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Nugroho (2020) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja BPD, antara lain:

a. Faktor Internal

1) Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sangat mempengaruhi kinerja BPD secara keseluruhan. Hal ini meliputi tingkat pendidikan, pengalaman organisasi, dan pemahaman terhadap tugas dan fungsi BPD. Wibowo (2019) menekankan bahwa rendahnya kapasitas anggota BPD menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi kinerja BPD.

2) Komitmen dan Motivasi

Komitmen dan motivasi anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat mempengaruhi kualitas kinerja BPD. Fajar (2021) menjelaskan bahwa anggota BPD yang memiliki komitmen tinggi terhadap kepentingan masyarakat akan lebih optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi.

b. Faktor Eksternal

1) Dukungan Pemerintah Desa

Dukungan pemerintah desa, khususnya kepala desa, sangat mempengaruhi efektivitas kinerja BPD. Hal ini meliputi dukungan dalam bentuk penyediaan informasi, koordinasi dalam pelaksanaan program, dan respons terhadap hasil pengawasan BPD. Sari (2020) menegaskan bahwa koordinasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa akan menciptakan sinergi yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2) Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan BPD sangat mempengaruhi legitimasi dan efektivitas kinerja BPD. Yusuf (2019) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi akan memberikan dukungan moral dan politik bagi BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penekanan pada pendekatan partisipatif (Simonigar et al., 2023). Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber data

yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data dan analisis data kualitatif yang diperoleh untuk memperdalam pemahaman tentang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong. Pendekatan ini dipilih agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena pelaksanaan tugas BPD. Penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, observasi lapangan (Alfansyur & Mariyani, 2020). Informan kunci dalam penelitian ini mencakup Anggota BPD, Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, Tokoh masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis, kebijakan, dan statistik, seperti Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Notulen rapat BPD dan musyawarah desa, Laporan kinerja BPD. Observasi lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung kondisi lingkungan, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan kinerja BPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bab V Pasal 31 bahwa fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa (Fungsi regulasi); menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa (Fungsi penyerapan aspirasi); dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Fungsi pengawasan) (Indonesia, 2024).

Berdasarkan analisis terhadap indikator input, proses, output, dan outcome, kinerja BPD Desa Barambang dapat dilihat dari pembahasan berikut:

1. Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Fungsi Regulasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 528 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Se-Kabupaten Sinjai Tahun 2019-2025 diperoleh data bahwa jumlah anggota BPD Desa Barambang sebanyak 7 (Tujuh) orang. Berikut data tersebut dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Daftar Anggota BPD Desa Barambang Periode 2019-2027

No	Nama	Masa Jabatan
1	Lukmanul Hakim	2019-2027
2	Sakti Ilham	2019-2027
3	Suardi, S.Sos.	2019-2027
4	Amrin	2019-2027
5	Muh. Asri	2019-2027
6	Muh. Fajar, S.Pd.	2019-2027
7	Irmawati, A.Ma.	2019-2027

Sumber Data: BPD Desa Barambang; 2025

Untuk mendukung kinerja pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong, maka telah dianggarkan dana sekitar Rp. 15.000.000, Pertahun. Jumlah dana itu tidak berubah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. BPD Desa Barambang juga memiliki ruang kerja atau sekretariat seluas 4x6 m². Dari sarana dan prasarana tersebut BPD Desa Barambang telah melahirkan Peraturan Desa sebanyak 3 dokumen. Berikut datanya:

Tabel 2. Daftar Peraturan Desa 3 Tahun Terakhir di Desa Barambang

No.	Peraturan	Tahun
1	Peraturan Desa Nomor 3 Tahun tentang RKPDesa	2022
2	Peraturan Desa Nomor 1 Tentang APBDesa	2022
3	Peraturan Desa Nomor 1 Tentang APBDesa	2023
4	Peraturan Desa Nomor 2 Tentang Perubahan APBDesa	2023
5	Peraturan Desa Nomor 3 Tahun tentang RKPDesa	2023

Sumber Data: BPD Desa Barambang, 2025

Dari data diatas diperoleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa desa telah konsisten dalam menetapkan peraturan wajib (APBDesa dan RKPDesa), dengan peningkatan aktivitas legislasi pada tahun 2023. Desa telah memenuhi kewajiban penetapan APBDesa dan RKPDesa setiap tahun. Dari 2 peraturan (2022) menjadi 3 peraturan (2023). Disisi lain, adanya perubahan APBDesa menunjukkan adanya adaptabilitas.

2. Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Fungsi Aspirasi

Dalam menyerap aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa melakukan langkah-langkah seperti (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menampung aspirasi, keluhan, dan masukan dari masyarakat desa. (2) Aspirasi tersebut kemudian disampaikan kepada kepala desa dalam forum resmi atau rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setiap aspirasi yang masuk didokumentasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah desa. Koordinasi yang dilakukan berupa rapat koordinasi, dapat dilihat dalam table berikut ini;

Tabel 3. Daftar Kegiatan Rapat Koordinasi BPD Tahun 2022-2024

No.	Tahun Pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Rapat
1	2022	5
2	2023	5
3	2024	6
Total Kegiatan Rapat		16

Sumber Data: BDP Desa Barambang, 2025

Dari data diatas dapat diperoleh hasil analisis menunjukkan yang bahwa meskipun ada konsistensi dan peningkatan aktivitas dari 2022 ke 2024, frekuensi rapat masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi BPD. Dimana konsistensi di tahun 2022-2023 (5 rapat/tahun), kemudia Peningkatan positif di tahun 2024 (6 rapat/tahun) sehingga masih ada ruang perbaikan untuk mencapai frekuensi ideal (12 rapat/tahun).

3. Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

BPD melakukan pengawasan melalui rapat koordinasi dengan kepala desa, peninjauan langsung ke lokasi program, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban. Koordinasi dengan pemerintah desa berjalan cukup baik dengan intensitas pertemuan 2 kali pertahun. Pengawasan yg dilakukan yaitu pengawasan mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan realisasi kegiatan yg dilakukan oleh pemdes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota BPD Desa Barambang mengatakan bahwa Tata cara pengawasan BPD terhadap pemerintah desa meliputi dua mekanisme utama: monitoring (pemantauan) dan evaluasi. BPD memantau kegiatan pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) untuk menilai kinerja kepala desa selama setahun anggaran. Hasil pengawasan dicatat, BPD dapat meminta keterangan, menyatakan pendapat, memberikan masukan untuk musyawarah desa, dan hasilnya menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD melakukan musyawarah dengan kepala desa untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti (1) Rencana kerja pemerintah desa, (2) Pelaksanaan anggaran, (3) Pelayanan masyarakat.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan demokrasi desa di Desa Barambang

Dalam melihat kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor fundamental yang sangat mempengaruhi kinerja BPD di Desa Barambang. Anggota BPD perlu memiliki pemahaman yang memadai tentang tata kelola pemerintahan desa, regulasi yang

berlaku, dan mekanisme pengawasan. Tingkat pendidikan yang memadai akan membantu mereka dalam menganalisis kebijakan, memahami anggaran desa, dan memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah desa.

Sebagai lembaga perwakilan masyarakat, anggota BPD harus mampu berkomunikasi efektif dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat desa hingga pemerintah desa. Kemampuan negosiasi yang baik diperlukan dalam menyelesaikan konflik dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan desa.

Pengalaman dalam mengelola organisasi atau terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan akan sangat membantu anggota BPD dalam menjalankan fungsinya. Pengalaman ini mencakup kemampuan mengelola rapat, menyusun laporan, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Berikut data tingkat pendidikan Anggota BPD Desa Barambang.

Tabel 4. Data Anggota BPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Lukmanul Hakim	SMA
2	Sakti Ilham	SMA
3	Suardi, S.Sos.	S1
4	Amrin	SMA
5	Muh. Asri	SMA
6	Muh. Fajar, S.Pd.	S1
7	Irmawati, A.Ma.	D3

Sumber Data: BPD Desa Barambang, 2025

Dari data diatas menunjukkan bahwa mayoritas anggota BPD (57,1%) memiliki latar belakang pendidikan SMA, sementara sisanya memiliki pendidikan tinggi (S1 dan D3). Keberagaman ini dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan strategi pengembangan kapasitas yang tepat.

2. Dukungan Pemerintah Desa

Dukungan dari pemerintah desa, khususnya kepala desa dan perangkat desa, sangat krusial bagi efektivitas kinerja BPD. Pemerintah desa harus transparan dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan desa, program pembangunan, dan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Keterbukaan ini memungkinkan BPD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Papan alokasi anggaran yang dipajang didepan kantor desa merupakan wujud nyata dari dukungan pemerintah kepada semua pihak termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melihat secara

Meskipun memiliki peran yang berbeda, pemerintah desa dan BPD perlu berkolaborasi dalam pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan desa. Dukungan pemerintah desa dalam bentuk konsultasi dan koordinasi rutin akan meningkatkan efektivitas kerja BPD. Dukungan berupa penyediaan fasilitas kantor, anggaran untuk kegiatan operasional BPD, dan akses terhadap dokumen-dokumen penting akan memudahkan BPD dalam menjalankan tugasnya.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan energi penggerak utama bagi kinerja BPD yang optimal. Masyarakat yang aktif menghadiri dan berpartisipasi dalam musyawarah desa akan memberikan masukan berharga kepada BPD. Partisipasi ini mencakup penyampaian aspirasi, kritik konstruktif, dan saran perbaikan untuk pembangunan desa. Masyarakat yang kritis dan peduli terhadap pengelolaan desa akan menjadi mitra BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Pengawasan sosial ini dapat berupa monitoring pelaksanaan program, penggunaan anggaran, dan kualitas pelayanan publik.

Dukungan masyarakat akan memberikan legitimasi yang kuat bagi BPD dalam menjalankan fungsinya. Ketika masyarakat percaya dan mendukung BPD, lembaga ini akan lebih mudah menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi dan pengawas pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam memberikan feedback terhadap kinerja BPD akan membantu lembaga ini untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan representasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di rumuskan kesimpulan bahwa BPD Desa Barambang telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk optimalisasi terutama dalam frekuensi koordinasi dan diversifikasi peraturan desa. Ketiga faktor yang mempengaruhi kinerja telah berjalan dengan baik dan saling mendukung. Penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang mempengaruhi kinerja BPD: (1) Kapasitas sumber daya manusia, dengan komposisi pendidikan anggota yang beragam; (2) Dukungan pemerintah desa, berupa penyediaan anggaran operasional per tahun, fasilitas sekretariat, dan keterbukaan informasi; (3) Partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah desa, pengawasan sosial, dan pemberian feedback untuk perbaikan berkelanjutan.

Adapun saran dari hasil penelitian ini, adalah:

1. Peningkatan frekuensi koordinasi dalam bentuk rapat - Dari 5-6 rapat per tahun perlu ditingkatkan menjadi 12 rapat per tahun untuk optimalisasi fungsi
2. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia - Dengan komposisi pendidikan yang beragam (57,1% SMA, sisanya S1 dan D3), diperlukan program pengembangan kapasitas yang terstruktur
3. Diversifikasi produk legislasi - Selain APBDesa dan RKPDesa yang sudah konsisten, perlu mengembangkan peraturan desa lainnya sesuai kebutuhan
4. Penguatan mekanisme partisipasi - Mengembangkan berbagai cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi desa di Desa Barambang

DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Indonesia, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31.
- Simonigar, J., Rotty, G. V., & Setijadi, N. N. (2023). Membangun Masyarakat 5.0 di Era Digital Melalui Pendidikan dan Komunikasi Berkelanjutan. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3),

1665–1676.

- Arifin, B. (2020). Kedudukan dan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 89-104.
- Fajar, M. (2021). Komitmen dan motivasi anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 156-171.
- Hadi, P. (2021). Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(1), 45-62.
- Jaya, I. K. (2021). Indikator kinerja Badan Permusyawaratan Desa: Sebuah tinjauan konseptual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 198-213.
- Kusuma, D. W. (2019). Fungsi penyerapan aspirasi BPD dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 3(1), 78-93.
- Mulyadi, R. (2021). Optimalisasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 134-149.
- Nugroho, A. B. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 245-262.
- Prasetyo, H. (2019). Hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa dalam sistem checks and balances. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(2), 167-184.
- Rahman, F. (2021). Otonomi desa dan implementasi demokrasi desa di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(1), 23-40.
- Sari, D. P. (2020). Koordinasi antara BPD dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 89-106.
- Setiawan, A. (2020). Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa. *Jurnal Hukum Administrasi*, 7(1), 45-58.
- Susanto, B. (2020). Evaluasi kinerja lembaga pemerintahan desa: Konsep dan implementasi. *Jurnal Evaluasi Kebijakan*, 6(2), 112-129.
- Sutoro, E. (2019). Demokrasi desa: Konsep dan implementasi dalam konteks otonomi daerah. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 7(3), 34-51.

- Wibowo, K. A. (2019). Kapasitas sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa dalam era otonomi desa. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 1(2), 78-95.
- Widjaja, H. (2020). Karakteristik demokrasi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 123-140.
- Yusuf, M. (2019). Partisipasi masyarakat dalam mendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Partisipasi Publik*, 4(1), 56-73.